



---

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN(LRA)**

Oleh

**Rachmad Chartady\*<sup>1</sup>, Vanisa Meifari<sup>2</sup>, Tiara Wulandari<sup>3</sup>, Ranti Utami<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

E-mail: <sup>1</sup>\*[chartady@stie-pembangunan.ac.id](mailto:chartady@stie-pembangunan.ac.id)

**Abstrak**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan instansi pemerintah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan instansinya. LRA menjadi salah satu laporan pertanggung- jawaban keuangan satuan kerja yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan yaitu: Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja), Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Analisis Efisiensi Belanja. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, karena kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang menurun pada Tahun 2020, dibuktikan dari: 1). Tahun 2020 jumlah anggaran belanja (Rp. 19.215.590.000) dan realisasi belanja (Rp 16.318.665.883) menurun pada Tahun 2019 dengan anggaran belanja Rp. 21.212.742.000 dan realisasinya Rp. 19.915.558.784. 2). Varians belanja pada Tahun 2020 (15,08%) lebih tinggi dari Tahun 2016 (6,12%). 3). Rasio pertumbuhan belanja pada Tahun 2020 turun sebesar 18,06%.

**Kata Kunci: Kinerja Belanja, Laporan Realisasi Anggaran**

**PENDAHULUAN**

Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam mengelola APBN dapat dilihat dari tingkat kinerjanya. Kinerja yang baik mencerminkan kondisi negara baik dan

kinerja yang buruk akan mencerminkan kondisi negara yang buruk juga. Tingkat keberhasilan kinerja keuangan dapat dinilai berdasarkan satuan nilai atau ukuran-ukuran angkanya dengan membandingkan realisasi anggaran berdasarkan anggaran-anggarnya.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penge-lolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Laporan Keuangan dalam Pemerintah mencakup Laporan Realisasi Anggaran



(LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sedangkan catatan atas laporan keuangan itu mencerminkan informasi tentang penjelasan dan daftar terinci dalam pos-pos yang disajikan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting. LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan.

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dinilai apakah anggaran pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sudah direalisasikan dengan baik atau tidak. Sejauh mana Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran.

Belanja dalam LRA Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang merupakan komponen penting yang mendapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Belanja tersebut juga mencerminkan kebijakan

dalam menghasilkan pendapatan yang merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka tindakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja daerah sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam LRA, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas suatu informasi keuangan.

Menurut Abdul Halim (2012), akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan". dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan".

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya.



Tujuan dari akuntansi pemerintah adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas seperti tenaga kerja, modal, tanah dan bahan baku guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.

### **Akuntansi Belanja**

Halim dan Kusufi (2013:102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

### **Belanja Negara dalam APBN**

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 14, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal, belanja lain-lain.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU 17/2003, yang dimaksud dengan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penggunaan anggaran belanja sebagai bagian dari keuangan negara harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan. Berdasarkan PSAP Nomor 02, Penyajian dan pengungkapan klasifikasi belanja dalam laporan keuangan salah satunya dapat disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat pada lembar muka laporan keuangan yaitu belanja dengan klasifikasi menurut jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Lain-Lain/Tak Terduga.

### **METODE PENELITIAN**

#### **a. Unit Analisis, Populasi dan Sampel**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No.1 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang Tahun 2019 – 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang periode anggaran Tahun 2019-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*.

#### **Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah:



1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, dengan menggunakan rumus dari Mahmudi (2010:157):

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun, dengan menggunakan rumus dari Mahmudi (2010:160):

$$\text{Realisasi Belanja tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja tahun } t - \text{Realisasi Belanja tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja tahun } t-1}$$

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi (Mahmudi, 2010:162).

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi pada tahun anggaran bersangkutan, menggunakan rumus dari Mahmudi (2010:164):

$$\text{Realisasi Belanja operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi

mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan, menggunakan rumus dari Mahmudi (2010:164):

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

4. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, dengan rumus menggunakan dari Mahmudi (2010:166):

$$\text{Realisasi Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Tabel 1. Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2019-2020**

TAHUN	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	SELISIH	%
2019	19.915.558.784	21.212.742.000	- 1.297.183.216	-6,12
2020	16.318.665.883	19.215.590.000	- 2.896.924.117	- 15,08

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa selisih anggaran dan realisasi terbesar pada Tahun 2020 sejumlah Rp. 2.896.924.117 atau sebesar 15,08%. Terjadi kenaikan varians belanja pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Tahun 2019, yaitu sebesar 8,96%.

**Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2019-2020**

URAIAN	REALISASI		PERTUMBUHAN	
	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
BELANJA	16.318.665.883	19.915.558.784	- 3.596.892.901	-18,06
BELANJA OPERASI	15.116.052.947	17.018.947.903	- 1.902.894.956	- 21,27
Belanja Pegawai	7.584.906.221	7.858.759.602	- 273.853.381	- 3,48
Belanja Barang	7.531.146.726	9.160.188.301	- 1.629.041.575	- 17,78
BELANJA MODAL	1.202.612.936	2.896.610.881	- 1.693.997.945	- 58,48
Belanja Peralatan dan Mesin	1.202.612.936	2.896.610.881	- 1.693.997.945	- 58,48

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja pada Tahun 2020, dimana secara keseluruhan menunjukkan penurunan pertumbuhan. Penurunan tertinggi



pada belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.693.997.945 atau 58,48%. Secara umum total belanja turun sebesar Rp. 3.596.892.901 atau 18,06%.

**Tabel 3. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja**

TAHUN	BELANJA MODAL (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	RASIO (%)
2019	17.018.947.903	19.915.558.784	85,46
2020	15.116.052.947	16.318.665.883	92,63

Dari Tabel 3 terlihat adanya kenaikan rasio pada Tahun 2020. Rasio tertinggi terdapat pada Tahun 2020 sebesar 92,63% dan rasio terendah pada Tahun 2019 sebesar 85,46%.

**Tabel 4. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja**

TAHUN	BELANJA MODAL (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	RASIO (%)
2019	2.896.610.881	19.915.558.784	14,54
2020	1.202.612.936	16.318.665.883	7,37

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat rasio pada Tahun 2019 dan 2020. Rasio tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 14,54% dan rasio terendah pada Tahun 2020 sebesar 7,37%.

**Tabel 5. Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019-2020**

TAHUN	REALISASI BELANJA (Rp)	ANGGARAN BELANJA (Rp)	PERSENTASE (%)
2019	19.915.558.784	21.212.742.000	93,88
2020	16.318.665.883	19.215.590.000	84,92

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas dapat dilihat rasio efisiensi belanja mengalami penurunan pada Tahun 2020. Rasio efisiensi belanja pada Tahun 2019 yaitu 93,88%, sedangkan rasio efisiensi pada Tahun 2020 menurun menjadi 84,92%. Rata-rata rasio efisiensi belanja sebesar 89,40%.

## Pembahasan

### 1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat selisih anggaran belanja dan realisasinya yang bersaldo negatif, ini menunjukkan adanya efesiensi/penghematan anggaran belanja sebesar Rp. 1.297.183.216 atau 6,12%. Pada Tahun Anggaran 2020 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 2.896.924.117 atau 15,08%.

Hal ini berarti bahwa Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan. Dengan demikian dilihat dari analisis varians belanja Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dapat dikatakan telah memanfaatkan APBN dengan baik.

### 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan belanja yang bersaldo negatif Rp. 3.596.892.901 atau sebesar -18,06% dari total realisasi belanja Tahun 2019. Pada dasarnya Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang telah mengupayakan pemanfaatan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Penurunan pertumbuhan belanja di tahun 2020 ini disebabkan oleh belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi Covid-19 yaitu belanja perjalanan dinas. Dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar, maka sebagian besar kegiatan dialihkan menjadi daring. Hal tersebut mengakibatkan anggaran perjalanan dinas (ke luar kabupaten/kota/provinsi) tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya sehingga tidak terserap dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya.

### 3. Analisis Keserasian Belanja

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dalam mengalokasikan belanjanya memiliki kecenderungan persentase yang cukup besar digunakan untuk belanja operasi dimana selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun



2020 rata-rata belanja operasi mencapai 89,04% dari keseluruhan belanja. Sedangkan untuk belanja modal selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang mengalokasikan rata-rata hanya 10,95%. Tahun 2020, belanja operasi tersebut dialokasikan pada belanja pegawai Rp. 7.584.906.221 atau 92,25% dan belanja barang Rp. 7.531.146.726 atau 73,16%.

Berdasarkan analisis keserasian belanja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dalam anggaran maupun realisasi belanjanya lebih besar persentasenya pada belanja operasi bagi pelaksanaan program-program/kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan refocusing anggaran yaitu kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penanganan covid-19 di pertengahan tahun 2020, khususnya pengurangan anggaran belanja modal seperti pengadaan ABBM Lab dan Non Lab yang belum dikontrakan maka dialihkan / dipotong untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19, baik untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan dalam rangka menekan laju kenaikan kasus Covid 19.

#### 4. Analisis Efisiensi Belanja

Dalam LRA Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran belanja. Tahun 2019, total realisasi belanja sebesar 93,88% dari total anggaran belanja yang dianggarkan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Tahun 2020, total realisasi belanja sebesar 84,92% dari total anggaran belanja yang dianggarkan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.

Selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang telah melakukan efisiensi belanja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2017 kurang dari 100%

dimana rata-rata efisiensi belanja sebesar 89,4%.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang menurun pada Tahun 2020, dibuktikan dari:

1. Tahun 2019 jumlah anggaran belanja Rp. 21.212.742.000 dengan realisasi belanja Rp. 19.915.558.784 menurun pada Tahun 2020, anggaran belanja Rp. 19.215.590.000 dan realisasinya Rp. 16.318.665.883.
2. Varians belanja pada Tahun 2020 (15,08%) lebih tinggi dari Tahun 2019 (15,60%).
3. Rasio pertumbuhan belanja pada Tahun 2020 turun sebesar 18,06%.

### Saran

1. Penyerapan anggaran belanja pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang Tahun 2020 sudah baik walaupun nilai anggaran yang diberikan lebih kecil dari Tahun 2019, maka disarankan kiranya dapat lebih mengoptimalkan lagi penyerapan dana anggaran tersebut agar tahun-tahun selanjutnya bisa mendapatkan apresiasi dari stakeholders berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran
2. Persentase alokasi realisasi belanja operasi sangat besar dibandingkan persentase untuk belanja modal yang hanya berada dibawah 15%, untuk itu disarankan agar dapat dilakukan pertimbangan antara belanja modal dan belanja operasi. Belanja modal dapat berupa peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran dan suasana akademik di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.



3. Rasio pertumbuhan belanja yang menurun di Tahun 2020 hendaknya menjadi perhatian Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, terutama dalam penyusunan mata anggaran untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan rasio pertumbuhan belanja Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.

Dinas Sosial Kabupaten Berau. *Journal of Economic, Management and Accounting*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.

[11] Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiman, Y. Rizal dan Heince Wokas. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Volume 3 No.1 Tahun 2015.
- [2] . 2012. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Fokusmedia.
- [3] \_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- [4] . 2019. *Modul Pokok-Pokok APBN 2020. Kementerian Keuangan RI, Jakarta*.
- [5] Arif, Muchlis Bahtiar dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia. Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta:
- [6] Erlangga.
- [7] \_\_\_\_\_.2019. *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 225 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat*.
- [8] R, B. (2013). *JDIH BPK RI Anggaran Belanja*. Retrieved 07 20, 2021 from [https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Anggaran\\_Belanja.pdf](https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Anggaran_Belanja.pdf)
- [9] *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran*
- [10] Ratnasari, Warti dan Siti Munawaroh. 2019. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN